



Pengenalan Pajak dalam Kehidupan Sehari-Hari kepada Guru Bimbingan dan Konseling Anggota MGBK (Musyawarah Guru Bimbingan Konseling) Kab. Pekalongan di SMA Negeri I Wiradesa Pekalongan

Mudjiyono¹, Sudarman², Hani Krisnawati³, Endang Dwi W⁴, Praditya Dewi A⁵
^{1,2,3,4,5} STIE AKA Semarang

Abstract

The economic growth of Pekalongan Regency, which is getting better, is not followed by awareness of citizens in complying with tax payments in a timely manner and in accordance with their income. This can be seen from the level of taxpayer compliance in reporting annual tax return (SPT) taxes at KPP Pratama Pekalongan which is still lacking. Seeing the vision and mission of Pekalongan Regency, it gives encouragement to the community to continue to increase the potential of existing resources, for example in the fields of agriculture, trade, plantations, even in the field of education. Increased utilization of potential resources will lead to increased economic growth in Pekalongan Regency. Increasing economic growth is related to the awareness and compliance of Pekalongan Regency residents with taxes. This Community Service Activity (PKM) is expected to provide an introduction and encouragement for teachers to introduce and apply the importance of implementing tax compliance, both to fellow teachers, to students, and to the surrounding environment.

Keywords: Tax, Economic Growth, Tax System

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan yang semakin membaik, tidak diikuti dengan kesadaran warga dalam kepatuhan pembayaran pajak secara tepat waktu dan sesuai dengan penghasilannya. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak di KPP Pratama Pekalongan yang masih kurang. Melihat visi misi Kabupaten Pekalongan, memberikan suatu dorongan kepada masyarakat untuk terus meningkatkan potensi sumber daya yang ada, misalnya di bidang pertanian, perdagangan, perkebunan, bahkan di bidang pendidikan. Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya akan menjadikan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pekalongan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kesadaran dan kepatuhan warga Kabupaten Pekalongan terhadap pajak. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini diharapkan dapat memberikan pengenalan dan dorongan bagi para guru untuk mengenalkan dan menerapkan pentingnya melaksanakan kepatuhan perpajakan, baik terhadap sesama guru, pada siswa, maupun lingkungan sekitar.

Kata Kunci : Pajak, Pertumbuhan Ekonomi, Sistem Perpajakan

PENDAHULUAN

Pekalongan adalah salah satu kota pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Kota ini terletak di jalur Pantura yang menghubungkan Jakarta-Semarang-Surabaya. Pekalongan berjarak 101 km sebelah barat Semarang, atau 384 km sebelah timur Jakarta. Pekalongan dikenal dengan julukan kota batik, karena batik Pekalongan memiliki corak yang khas dan variatif. Kota Pekalongan masuk jaringan kota kreatif UNESCO dalam kategori *crafts & folk art* pada Desember 2014 dan memiliki *city branding World's city of Batik*. Pekalongan berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Batang di timur, serta Kabupaten Pekalongan di sebelah selatan dan barat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan selama lima tahun semakin membaik dan menunjukkan peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa di Kota Pekalongan terjadi pertumbuhan produksi barang dan jasa secara riil dari tahun ke tahun, seperti ditunjukkan dari tahun ke tahun selama kurun waktu 2012-2016 (RKPD Pekalongan tahun 2019).

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan yang semakin membaik, tidak diikuti dengan kesadaran warga dalam kepatuhan pembayaran pajak secara tepat waktu dan sesuai dengan penghasilannya. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak di KPP Pratama Pekalongan yang masih kurang. Jumlah total wajib SPT yang terdaftar di KPP Pratama Pekalongan sebanyak 107.000, tetapi yang melaporkan pajaknya hanya sekitar 50% (Radar Pekalongan, 22 Maret 2019). Kepala KPP Pratama Pekalongan, Taufik Wijianto juga mengungkapkan bahwa saat ini pertumbuhan wajib pajak di KPP Pratama sangat tinggi. Menunjukkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang semakin meningkat dan bagus, ditandai dengan mulai meningkatnya pertumbuhan UMKM dan pengusaha kecil. Masalah yang dihadapi oleh pihak KPP terhadap wajib pajak baru, setelah WP memiliki NPWP mereka belum sadar untuk lapor. Ketakutan yang dihadapi oleh WP baru adalah mereka harus membayar pajak, padahal mereka belum mempunyai penghasilan. Taufik Wijianto juga menyatakan, saat ini KPP menginginkan para wajib pajak untuk mengerti kesadaran dalam melaporkannya terlebih dahulu karena untuk WP yang wajib membayar pajak merupakan WP yang telah memiliki penghasilan (Radar Pekalongan, 22 Maret 2019).

Visi Kabupaten Pekalongan yang ingin dicapai dalam suatu periode perencanaan, berdasarkan pada situasi dan kondisi saat ini. Kondisi ideal yang ingin diwujudkan tersebut diharapkan mampu memberikan spirit atau semangat kepada seluruh pihak di dalam organisasi pemerintah daerah untuk mencapainya dan menjadikan pengarah bagi pemangku kepentingan untuk dapat mendukung tercapainya tujuan ideal tersebut. Sedangkan misinya adalah Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan. Misi Kabupaten Pekalongan adalah mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat, meningkatkan pembangunan kehidupan keagamaan masyarakat yang lebih baik, menyelenggarakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih dan berakhlak, meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan, memantapkan potensi sosial budaya lokal untuk peningkatan daya saing daerah, mendorong iklim investasi yang berbasis pada potensi ekonomi daerah.

Melihat visi misi Kabupaten Pekalongan, memberikan suatu dorongan kepada masyarakat untuk terus meningkatkan potensi sumber daya yang ada, misalnya di bidang pertanian, perdagangan, perkebunan, bahkan di bidang pendidikan. Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya akan menjadikan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pekalongan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kesadaran dan kepatuhan warga Kabupaten Pekalongan terhadap pajak.

Pajak adalah sumber penerimaan negara yang paling besar (82,4) diantara penerimaan lainnya penerimaan negara bukan pajak (17,4) dan hibah (0,2), sehingga tanpa pajak maka negara ini tidak bisa terus bergerak maju dan berkembang dikarenakan tidak ada adanya dana. Pajak bagi negara adalah merupakan pendapatan yang nanti pada akhirnya akan didistribusikan keanggaran rutin, pembangunan dan social diberbagai bidang atau sektor-sektor yang termaktub dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN/APBD). Jika pajak naik melebihi yang ditargetkan dalam APBN atau APBD, maka beban-beban negara yang akan dilaksanakan akan dapat segera terwujud, bahkan kelebihanannya dapat digunakan untuk meningkatkan pembangunan diberbagai sector serta kemungkinan besar untuk menambah pemberian bantuan kepada masyarakat khususnya kaum miskin semakin besar, sehingga dapat mensejahterakan kepada masyarakat. Namun jika pendapatan atas pajak menurun, maka akan berakibat pada terhambatnya khususnya sektor pembangunan dan kemungkinan perhatian terhadap kaum miskin menurun dan tidak

dapat tersentuh dengan baik secara menyeluruh dan kesejahteraan bagi masyarakat berkurang.

Masyarakat pada umumnya mendengar kata-kata pajak sudah tidak respek, bahkan cenderung memandang negatif, mau tidak mau secara terpaksa tetap membayar pajak, karena dipotong oleh bendahara, hal ini karena ada aturan-aturan perpajakan yang mengatur khususnya pendapatan yang diperoleh baik pribadi maupun organisasi atau lembaga yang melebihi dari batas Pendapatan Tidak Kena Pajak. Kemungkinan yang terjadi pada wajib pajak pribadi maupun badan atau lembaga mengabaikan kewajiban untuk membayar pajak jika tidak ada aturan-aturan dalam perundang-undangan perpajakan. Sebenarnya mereka hanya tidak mengetahui tentang manfaat pajak dan apa yang bisa diperoleh dari membayarnya. Oleh karena itu pengetahuan tentang pajak sangat dibutuhkan sejak dini untuk membentengi masyarakat dari *stereotype* pajak yang buruk dan salah ini, pembekalan semacam ini bisa dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di lingkungan keluarga misalnya, orang tua bisa memberikan pemahaman kepada anak bahwa kemudahan akses yang dimiliki keluarga, ketercukupan Sumber Daya Alam, dan juga banyaknya penyedia kebutuhan sehari-hari adalah hasil dari mereka yang membayar pajak setiap bulannya. Dari lingkungan keluarga inilah anak akan memahami bahwa sebenarnya uang yang kita bayarkan setiap bulannya adalah untuk kebutuhan kita sendiri.

Pada saat anak berada di lingkungan sekolah, guru bisa mengajarkan kepada anak bahwa karena pajaklah mereka bisa menikmati fasilitas sekolah karena bangunan sekolah, fasilitas yang ada di sekolah, dana operasional sekolah dan juga gaji dari guru-guru mereka berasal dari uang pajak yang dibayarkan warga negara yang taat membayar pajak. Kemudian dari lingkungan masyarakat, anak-anak bisa belajar bahwa fasilitas umum yang bisa dinikmati oleh masyarakat adalah hasil dari uang pajak yang digunakan untuk membangun sarana dan prasarana yang akan berguna untuk masyarakat luas karena bisa menjadi jembatan untuk tercapainya pemerataan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Uang pajak yang berhasil dikumpulkan Negara, akan disalurkan keseluruh instansi dan akan digunakan untuk membiayai selain biaya rutin operasional negara, juga untuk biaya pembangunan fasilitas umum seperti pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, yang semuanya ini direncanakan dalam anggaran pada RAPBN/RAPBD yang nantinya

diputuskan dalam sidang dalam penentuan Anggaran oleh pemerintah dan DPR selaku wakil rakyat setiap tahun menjadi APBN/APBD.

Masyarakat saat ini sudah dimudahkan dan selalu diingatkan untuk membayar pajak yang dikumandangkan terus menerus setiap tahunnya berbentuk pamflet, brosur dan spanduk melalui kantor-kantor perpajakan, kantor kecamatan, dan kantor pemerintahan desa, yang memberikan himbauan untuk membayar pajak tepat pada waktunya, untuk Wajib Pajak Pribadi paling lambat 31 Maret dan untuk Wajib Pajak Badan paling lambat 31 April.

Sistem perpajakan sejak tahun 1983 peraturan perpajakan menggunakan sistem *self assessment*, yang sebelumnya menggunakan sistem *official assessment*. Sistem *self assessment* maksudnya adalah prinsip pemenuhan kewajiban perpajakan yang mewajibkan Wajib Pajak untuk menghitung, membayar sendiri, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri melalui dokumen Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan baik secara langsung, online, pos maupun ASP. Ciri-ciri corak sistem pemungutan pajak sistem ini adalah:

- Berinisiatif mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan NPWP.
- Menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Realisasi pendapatan negara tumbuh 19,76 persen yang mencapai Rp. 1.483,86 triliun atau 78,32 persen dari target dalam APBN tahun 2018 yang dinilai lebih baik dibandingkan realisasi pendapatan negara tahun 2017 yang mencapai Rp. 1.239,03 triliun atau 71,37 persen dari target penerimaan pajak tahun 2018 mencapai Rp. 1.315,9 triliun, atau hanya 92% realisasi dari target APBN 2018 sebesar Rp. 1.424 triliun (capaian APBN 2018 Kemenkeu go.id. akses 9/1/2020) Masih tidak sesuai atau kurang dari target APBN, namun walaupun belum memenuhi target untuk tahun 2018, jika pemenuhan sektor pajak terhadap target APBN untuk tahun 2018 adalah lebih baik dibandingkan dengan pemenuhan sektor pajak terhadap target APBN tahun 2016 dan tahun 2017.

Diharapkan untuk tahun 2019 dan tahun 2020 dan untuk kedepannya pendapatan dari sektor pajak dapat memenuhi target APBN. Dengan catatan:

1. Perlunya sosialisasi pajak kepada masyarakat terusmenerusdansemakin ditingkatkan.
2. Memberikan reward atau rangsangan bagi wajib pajak berdisiplin dalam peduli terhadap pajak yang selama 5 tahun berturut-turut membayar pajak tepat pada waktunya.
3. Memberikan kemudahan-kemudahan serta bimbingan yang intensif kepada wajib pajak pemula.
4. Memberikan kesan positif kepada masyarakat bahwa pajak yang diterima dari rakyat akan kembali kepada rakyat melalui sektor-sektor pembangunan yang mendukung pengembangan dan pertumbuhan pendapatan masyarakat.
5. Lebih ditingkatkan peran pengawas pembangunan dan peran pemberantasan korupsi terhadap sektor-sektor pembangunan di APBN dan APBD.

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini ada 5 (lima) orang sebagai tim pelaksana, yang terdiri atas dosen 1 (satu) orang sebagai ketua tim, dan 4 (empat) sebagai anggota. Kualifikasi dari tim yang bertugas tentunya dicari yang relevan dengan tim pengabdian. Harapannya dapat memberikan pengenalan dan dorongan bagi para guru untuk mengenalkan dan menerapkan pentingnya melaksanakan kepatuhan perpajakan, baik terhadap sesama guru, pada siswa, maupun lingkungan sekitar. Kegiatan tidak dapat berjalan dengan baik, terkonsep, dan terstruktur jika tidak ada pembagian tugas yang baik pula. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam kegiatan pengabdian ini, tim secara otomatis membentuk deskripsi kerja (*job description*), baik untuk ketua maupun anggota.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat STIE AKA Semarang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2020 dengan mengambil tempat di SMA Negeri 1 Wiradesa, Pekalongan dengan jumlah peserta sebanyak 28 orang yang merupakan guru yang termasuk dalam pengurus dan anggota MGBK Pekalongan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan beberapa metode yaitu:

1. Ceramah

Ceramah dilakukan dengan judul “Pengenalan pajak dalam Kehidupan Sehari-hari”. Narasumber dari dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AKA Semarang.

2. Tanya jawab

Sesi tanya jawab merupakan bagian lanjutan dan kegiatan. Pertanyaan diajukan oleh para peserta yaitu para guru anggota MGBK Pekalongan, yang ditujukan kepada narasumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Susunan acara pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dari tim STIE AKA Semarang:

Tabel 1. Susunan Acara Pelaksanaan Kegiatan

No.	Waktu	Susunan Acara	Pelaksana
1	09.00 – 09.30	Persiapan dan Presensi peserta	Praditya Dewi A, S.E. M.Si.
2	09.30 – 10.00	Pengarahan	Hani Krisnawati, S.E., M.Si.
3	10.00 – 12.00	Ceramah	Mudjiono, S.E, M.Si.
4	10.00 – 12.00	Moderator	Sudarman, S.E., M.M., Ak., CA., CPA.
5	12.00 – 13.00	Istirahat	
6	13.00 – 14.00	Tanya Jawab	Mudjiono, S.E, M.Si.
7	14.30 – 15.00	Penutup	Endang Dwi Wahyuni, S.E., M.Si., Ak.

Kegiatan ini diterima sangat antusias oleh para peserta yang mengikuti pemaparan mengenai perpajakan ini. Perwakilan dari pengurus MGBK Pekalongan mengungkapkan harapannya mengenai kegiatan ini agar berlanjut sampai kepada pendampingan-pendampingan selanjutnya, sehingga para guru memahami semua aspek. Selain itu juga, mendapat respon yang sangat positif dari para peserta, terjadi interaksi baik pada sesi ceramah maupun pada saat sesi tanya jawab.

Evaluasi pelaksanaan kegiatan ini dapat dikatakan berhasil, karena antusiasme peserta yang tinggi dan didukung oleh kehadiran perwakilan pengurus MGBK Pekalongan. Selain itu peserta juga menginginkan ada pendampingan lanjutan. Materi ceramah yang sudah dibagikan kepada para peserta akan menjadi bahan untuk pengetahuan, lebih dari itu sebagai bahan pembelajaran.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim Dosen STIE AKA Semarang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Diharapkan pelajar para guru yang mengikuti kegiatan ini, memperkenalkan mengenai pentingnya mematuhi pajak kepada lingkungan sekitarnya.
2. Peserta pengabdian mampu menerapkan ilmu yang telah di arahkan oleh pemateri.
3. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para guru bimbingan konseling pada khususnya dan seluruh pengajar yang berada di wilayah Pekalongan pada umumnya.

Dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang telah berlangsung dengan memperoleh tanggapan yang positif dan antusias, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh STIE AKA Semarang perlu ditindak lanjuti dengan mengadakan kunjungan lagi dilain waktu.
2. Para guru yang sudah mengikuti kegiatan ini hendaknya berusaha untuk mengenalkan sedikit demi sedikit mengenai perpajakan kepada siswa-siswinya.
3. Kepala sekolah, guru-guru dan peserta pengabdian hendaklah tidak malu untuk bertanya menghadapi hambatan dalam aktivitas sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayza, Bustamar. 2017. *Hukum Pajak Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia.
- Badan Pemerintah Daerah. 2019. *RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kota Pekalongan Tahun 2019*. <http://bappeda.pekalongankota.go.id/> (Januari 2020).
- Kabupaten Pekalongan. <http://pekalongankab.go.id> (Januari 2020).
- Mahi, B. Raksaka, Rinto, dan Sofia. 2018. *Kebijakan Perpajakan: Optimalisasi Insentif dan Kesenambungan Fiskal*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muljono, Djoko. 2009. *Tax Planning: Menyiasati Pajak dengan Bijak*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Radar Pekalongan. 2019. Duh, Tingkat Kepatuhan Laporan SPT Pajak Masih Kurang. <https://radarpekalongan.co.id/64733/duh-tingkat-kepatuhan-lapor-spt-pajak-masih-kurang/> (Januari 2020)